



DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAHAN (LaKIP)  
TAHUN ANGGARAN  
2025

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN



LaKIP-2025

## KATA PENGANTAR

Berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja maka Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan mempunyai kewajiban untuk setiap akhir tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk disampaikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban formal atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang berkaitan dengan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan ini merupakan gambaran realisasi kinerja capaian sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai bahan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Melalui Laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan Good Governance dan clean governance.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan.

Buntak, Pebruari 2026

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Barito Selatan,



**HARMITO, S.Pd., MM**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700201 199303 1 019

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi satuan kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan; merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan oleh karena itu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito selatan, menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LaKIP) Tahun 2025.

Untuk itu Kedudukan, peran, tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis serta target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 – 2029, Rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambar umum SKPD.....	1
C. Peran strategis .....	11
D. Sistematika Penyusunan .....	12
<b>BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Strategis .....	13
B. Perjanjian Kinerja (dilampiran) .....	
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	16
B. Realisasi Anggaran ( Akuntabilitas Keuangan ) .....	18
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	22
B. Saran .....	22
LAMPIRAN.....	24

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan memiliki tugas yang strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang industri, perdagangan, hingga Koperasi dan UKM. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Salah satu azas penyelenggara Pemerintahan yang baik (good governance) yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum, dan salah satu diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 guna mencapai visi dan melaksanakan misi sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi , serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja instansi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

#### **B. Gambaran Umum.**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan dengan Tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Perda Nomor 44 tahun 2022, tanggal 07 November 2022 .tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ; dan
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya .

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 dilaksanakan mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Mendorong Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat, terhadap Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.1. Struktur Organisasi**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 44 tahun 2022, tanggal 07 November 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

##### **a. Kepala Dinas**

##### **b. Sekretariat**

III Subag. Umum dan Kepegawaian

III Subag. Perencanaan dan Keuangan

##### **c. Bidang Industri**

✓ Kepala Bidang Industri

##### **d. Bidang Perdagangan ;**

III Kepala Bidang Perdagangan

##### **e. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :**

III Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ;

##### **f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) :**

III Kepala UPTD ; IIIIIII

III Sub Bagian Tata Usaha

##### **g. Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Tugas dan Fungsi :**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Industri , Perdagangan, Koperasi - UKM sesuai dengan PERDA tersebut diatas.

Dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Industri , Perdagangan, Koperasi - UKM tersebut diatas, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusari kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Kadaan Pegawai :**

#### **I. SEKRETARIAT**

Jumlah Pegawai Sekretariat secara keseluruhan berjumlah 21 ( dua puluh satu ) orang yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Sarjana S2	2 orang
2.	Sarjana S1	4 orang
3.	Diploma III (DIII)	1 orang
4.	Diploma II (DII)	- orang
5.	SLTA	- orang
6.	SLTP	orang
7.	SD	orang
	<b>JUMLAH</b>	7 orang

**b. Berdasarkan Pangkat ,Golongan dan Eselon :**

NO	PANGKAT	GOLONGAN	ESELON	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	II	1 orang
2.	Pembina TK I	IV/b	III	1 orang
3.	Pembina	IV/a	IV	orang
4.	Penata TK I	III/d	IV	1 orang
5.	Penata	III/c		2 orang
6.	Penata Muda TK I	III/b		orang
7.	Penata Muda	III/a		2 orang
8.	Pengatur TK I	II/d		orang
9.	Pengatur	II/c		orang
10.	Pengatur Muda TK I	II/b		orang
11.	Pengatur Muda	II/a		orang
12.	Juru	I/c		orang
		JUMLAH		7 Orang

**c. Berdasarkan Jenis Jabatan :**

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1.	Pejabat Struktural	2 orang
2.	Fungsional Tertentu	2 orang
3.	Fungsional Umum	3 orang
	JUMLAH	7 orang

**II. BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH ( IKM )**

Jumlah Pegawai Industri Kecil dan Menengah secara keseluruhan berjumlah 8 (Delapan) orang yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

**a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Sarjana S2	1 orang
2.	Sarjana S1	5 orang
3.	Diploma III (DIII)	1 orang
4.	Diploma II (DII)	0 orang
5.	SLTA	0 orang
6.	SLTP	0 orang
7.	SD	0 orang
	JUMLAH	7 orang

b. Berdasarkan Pangkat ,Golongan dan Eselon :

NO	PANGKAT	GOLONGAN	ESELON	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c		1 orang
2.	Pembina TK I	IV/b		2 orang
3.	Pembina	IV/a	III a	1 orang
4.	Penata TK I	III/d	IV a	9 orang
5.	Penata	III/c		5 orang
6.	Penata Muda TK I	III/b		5 orang
7.	Penata Muda	III/a		2 orang
8.	Pengatur TK I	II/d		2 orang
9.	Pengatur	II/c		orang
10.	Pengatur Muda TK I	II/b		orang
11.	Pengatur Muda	II/a		orang
12.	Juru	I/c		orang
	<b>JUMLAH</b>			20 orang

c. Berdasarkan Jenis Jabatan :

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1.	Pejabat Struktural	1 orang
2.	Fungsional Tertentu	2 orang
3.	Fungsional Umum	2 orang
	<b>JUMLAH</b>	5 orang

III. BIDANG PERDAGANGAN :

Jumlah Pegawai Bidang Perdagangan secara keseluruhan berjumlah 6 (enam) orang yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Sarjana S2	1 orang
2.	Sarjana S1	1 orang
3.	Diploma III (DIII)	1 orang
4.	Diploma II (DII)	orang
5.	SLTA	1 orang
6.	SLTP	orang
7.	SD	orang
	<b>JUMLAH</b>	4 orang

**b. Berdasarkan Pangkat , Golongan dan Eselon :**

NO	PANGKAT	GOLONGAN	ESELON	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c		orang
2.	Pembina TK I	IV/b		orang
3.	Pembina	IV/a		1 orang
4.	Penata TK I	III/d	IV a./IV b	2 orang
5.	Penata	III/c		1 orang
6.	Penata Muda TK I	III/b		orang
7.	Penata Muda	III/a		orang
8.	Pengatur TK I	II/d		orang
9.	Pengatur	II/c		orang
10.	Pengatur Muda TK I	II/b		orang
11.	Pengatur Muda	II/a		orang
12.	Juru	I/c		orang
	<b>JUMLAH</b>			<b>4 orang</b>

**c. Berdasarkan Jenis Jabatan :**

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1.	Pejabat Struktural	1 orang
2.	Fungsional Tertentu	3 orang
3.	Fungsional Umum	2 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>6 orang</b>

**IV. BIDANG KOPERASI - UKM :**

Jumlah Pegawai Bidang Koperasi secara keseluruhan berjumlah 6 (Enam) orang yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

**a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Sarjana S2	orang
2.	Sarjana S1	3 orang
3.	Diploma III (DIII)	orang
4.	Diploma II (DII)	orang
5.	SLTA	orang
6.	SLTP	orang
7.	SD	orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>3 orang</b>

**b. Berdasarkan Pangkat , Golongan dan Eselon :**

<b>NO</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Pembina Utama Muda	IV/c		orang
2.	Pembina TK I	IV/b	III b	orang
3.	Pembina	IV/a		orang
4.	Penata TK I	III/d	IV a	2 orang
5.	Penata	III/c		1 orang
6.	Penata Muda TK I	III/b		orang
7.	Penata Muda	III/a		orang
8.	Pengatur TK I	II/d		orang
9.	Pengatur	II/c		orang
10.	Pengatur Muda TK I	II/b		orang
11.	Pengatur Muda	II/a		orang
12.	Juru	I/c		orang
		<b>JUMLAH</b>		<b>3 orang</b>

**c. Berdasarkan Jenis Jabatan :**

<b>NO</b>	<b>JENIS JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Pejabat Struktural	1 orang
2.	Fungsional Tertentu	2 orang
3.	Fungsional Umum	orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>3 orang</b>

**V. UPTD PASAR BERINGIN :**

Jumlah Pegawai UPTD secara keseluruhan berjumlah 4 ( Empat ) orang yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

**a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Sarjana S2	orang
2.	Sarjana S1	2 orang
3.	Diploma III (DIII)	orang
4.	Diploma II (DII)	orang
5.	SLTA	2 orang
6.	SLTP	orang
7.	SD	orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>4 orang</b>

**b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :**

<b>NO</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Pembina Utama Muda	IV/c		orang
2.	Pembina TK I	IV/b		orang
3.	Pembina	IV/a		orang
4.	Penata TK I	III/d	IV a / IV b	1 orang
5.	Penata	III/c	-	orang
6.	Penata Muda TK I	III/b		orang
7.	Penata Muda	III/a		1 orang
8.	Pengatur TK I	II/d		orang
9.	Pengatur	II/c		orang
10.	Pengatur Muda TK I	II/b		orang
11.	Pengatur Muda	II/a		orang
12.	Juru	I/c		orang
		<b>JUMLAH</b>		<b>2 orang</b>

**VI. UPTD METROLOGI LEGAL :**

Jumlah Pegawai UPTD secara keseluruhan berjumlah 7 (Tujuh) orang yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

**a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Sarjana S2	orang
2.	Sarjana S1	5 orang
3.	Diploma III (DIII)	orang
4.	Diploma II (DII)	orang
5.	SLTA	2 orang
6.	SLTP	orang
7.	SD	orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>7 orang</b>

**b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :**

NO	PANGKAT	GOLONGAN	ESELON	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c		orang
2.	Pembina TK I	IV/b		orang
3.	Pembina	IV/a		orang
4.	Penata TK I	III/d	IV a / IV b	orang
5.	Penata	III/c	-	2 orang
6.	Penata Muda TK I	III/b		2 orang
7.	Penata Muda	III/a		1 orang
8.	Pengatur TK I	II/d		2 orang
9.	Pengatur	II/c		orang
10.	Pengatur Muda TK I	II/b		orang
11.	Pengatur Muda	II/a		orang
12.	Juru	I/c		orang
	<b>JUMLAH</b>			<b>7 orang</b>

Adapun jumlah pegawai yang ada pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito selatan sebagai berikut :

No	URAIAN	PNS	PPPK	JUMLAH
1.	SEKRETARIAT	6	6	12
2.	BIDANG IKM	6	3	9
3.	BIDANG PERDAGANGAN	5	4	9
4.	BIDANG KOPERASI - UKM	3	9	12
5.	UPTD PASAR BERINGIN	3	3	6
6.	KEBERSIHAN	-	11	11
7.	SATPAM	-	6	6
8.	SHOWROOM DEKRANASDA	-	2	2
9.	GUDANG ROTAN JELAPAT	-	1	1
10.	UPTD METROLOGI LEGAL	7		7
	<b>JUMLAH</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>99</b>

### C. Peran Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri, Perdagangan Koperasi-UKM sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 44 Tahun 2022, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian dengan 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis yang tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahunan dan Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel
2. Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam
3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi
5. Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian
6. Meningkatnya produktivitas koperasi
7. Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
8. Meningkatnya daya saing UMKM
9. Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha
10. Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi
11. Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
12. Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor
13. Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk
14. Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
15. Meningkatnya realisasi pembangunan industri
16. Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian
17. Meningkatnya pemanfaatan informasi industri

#### **D. Sistematika Penyusunan.**

Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan selama tahun 2025.

a. Kata Pengantar

b. Ringkasan Eksekutif

c. Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Rencana Strategis dan Perjanjian Kerja

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab IV. Penutup

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pembangunan bidang ekonomi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 - 2029 adalah terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan terpadu yang lebih merata, terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar serta meningkatkan daya saing masyarakat. Dengan sub agenda yang terkait langsung dengan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan antara lain Percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, Meningkatnya iklim investasi agar lebih kondusif.

Menyediakan tempat berusaha bagi pedagang informal; Memberikan pendampingan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk home industri; Merevitalisasi koperasi sebagai perekonomian masyarakat.

#### A.1 VISI dan MISI

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan merupakan instansi teknis yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan visi dan misinya dalam kurun waktu 2025 -2029 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.

Dalam mendukung agenda tersebut maka Kepala Dinas telah menetapkan

visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan yaitu :

***" Terwujudnya Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang Mandiri sebagai Motor Penggerak Ekonomi Menuju Masyarakat Dahani Dahani Tuntung Tulus"***

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan menetapkan

10 ( sepuluh ) Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 - 2029 Sebagai Berikut :

1. ***Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan yang didukung oleh Sarana dan Prasarana Memadai ;***
2. ***Menumbuh kembangkan Industri Kecil dan Menengah yang Kompetitif;***
3. ***Mengembangkan Perdagangan, baik Barang maupun Jasa sehingga Menjadi Tulang Punggung Perekonomian Kabupaten Barito Selatan;***

4. *Meningkatkan Promosi dan Perlindungan Konsumen, agar Produk UMKM Kabupaten Barito Selatan semakin di kenal ;*
5. *Meningkatkan Kemandirian Koperasi, Kesehatan Organisasi, serta Meningkatkan Usaha.*

## **A.2 Indikator Sasaran dan Sasaran Strategis**

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito selatan dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029, dalam rangka membangun sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang mampu menjawab tantangan ekonomi, mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan serta persaingan global yang cepat sebagai berikut :

### **Indikator Tujuan PD :**

1. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel
2. Mewujudkan Kualitas Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Mewujudkan Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
5. Mewujudkan Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan
6. Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas
7. Mewujudkan Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
8. Mewujudkan Pertumbuhan Wirausaha
9. Mewujudkan Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
10. Mewujudkan Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan
11. Mewujudkan Sarana Perdagangan yang berkualitas
12. Mewujudkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
13. Mewujudkan Nilai Ekspor Barang
14. Mewujudkan Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi
15. Mewujudkan pelaksanaan metrologi legal dalam rangka perlindungan konsumen
16. Mewujudkan Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
17. Meningkatkan Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
18. Meningkatkan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini

**Sasaran Strategis :**

1. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel
2. Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam
3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi
5. Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian
6. Meningkatnya produktivitas koperasi
7. Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
8. Meningkatnya daya saing UMKM
9. Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha
10. Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi
11. Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
12. Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor
13. Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk
14. Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
15. Meningkatnya realisasi pembangunan industri
16. Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian
17. Meningkatnya pemanfaatan informasi industri

### BAB. III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Tahun Anggaran 2025, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan 18 (Delapan Belas) Indikator Tujuan strategis dan 17 (tujuh belas) Sasaran kinerja yang akan dicapai. 18 (Delapan Belas) Indikator Tujuan strategis dan 17 (tujuh belas) tersebut selanjutnya diukur dengan 42 (empat puluh dua ) sub kegiatan pendukung. Realisasi sampai akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 18 (Delapan Belas) Indikator Tujuan strategis dan 17 (tujuh belas) ,dan 42 (empat puluh dua ) sub kegiatan pendukung telah dapat dicapai dengan hasil baik.

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah ini.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengukuran kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan, terletak seberapa jauh capaian dari masing-masing indicator kinerja yang telah ditetapkan untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran. Hasil pengukuran kemudian dikategorisasikan pencapaian kinerja per indikator sasaran kedalam 4 (empat) kategori :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Baik
II	80% sampai 90%	Baik
III	60% sampai 80%	Cukup
IV	Kurang dari 60%	Kurang

NO.	INDIKATOR KINERJA PD	BATUAN	TARGET	REALISASI SAMPAI TW IV 2025	KATEGORI CAPAIAN
1.	Nilai SAKIP DISDAGKOP UKM	KRITERIA	B		
	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	PERSEN	100	100	Sangat Baik
	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	PERSEN	100	100	Sangat Baik
	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	PERSEN	9,09	18,30	Sangat Baik
	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	PERSEN	9,09	18,30	Sangat Baik
2.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	PERSEN	15	9,34	Baik
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	PERSEN	25	25	Sangat Baik
	Persentase Koperasi aktif (%)	PERSEN	20	57,82	Sangat Baik
	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	PERSEN	20	100	Sangat Baik
	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	PERSEN	20	10,52	Sangat Baik
	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	PERSEN	30,92	37,97	Sangat Baik
	Pertumbuhan Wirasaha (%)	PERSEN	15	25,73	Sangat Baik
	Proporsi UKM Menjalani Kemitraan dan Ekspor (%)	PERSEN	20	14,28	Baik
	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	PERSEN	20	25,25	Sangat Baik
3.	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	PERSEN	79,4	80	Sangat Baik
	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	PERSEN	19,79	100	Sangat Baik
	Nilai Ekspor Barang (%)	PERSEN	0	100	Sangat Baik
	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	PERSEN	17,95	18,60	Sangat Baik

Dilihat dari hasil tabel indikator kinerja, kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2025. Namun demikian harus diakui masih terdapat sebagian target sasaran yang realisasinya belum dapat dicapai dengan sempurna.

**B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 ( AKUNTABILITAS KEUANGAN )**

Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik, dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
I	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.989.191.390	4.338.108.485	86,91
	Pelaksanaan Peratruckahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123.400.000	123.400.000	99,26
II	<b>Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah</b>			
1	Pengadaan Pakian Dinas beserta Kelengkapannya	30.000.000	30.000.000	100,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.350.000	12.350.000	35,29
III	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kendor	162.480.000	162.300.000	100,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.826.960	99.790.100	100,00
3	Penyediaan Barang Dataran dan Penguasaan	42.775.673	42.770.000	47,83
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.192.000	57.145.000	99,92
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	570.630.920	570.360.587	99,96
IV	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Kimbikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.099.936	73.240.741	89,21
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	817.600.000	730.300.090	71,77
V	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Bermotoran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.450.000	96.035.956	91,95
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.500.320	32.500.000	100,00
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>			
I	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
1	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25.228.200	25.206.200	92,40
2	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	16.700.000	10.558.000	58,57
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>			
I	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewilayahan Kabupaten/Kota	10.025.800	6.946.500	69,30
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>			
I	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	31.870.400	31.870.400	100,00
<b>E</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>			
I	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	Pemberdayaan Koperasi dengan/Keanggotaan Daerah/Kabupaten/Kota	315.891.395	194.094.200	229,52

No	Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5
<b>F</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>			
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengujian Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
1	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	137.293.000	127.593.000	92,93
2	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	11.550.000	9.311.000	80,34
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	12.499.500	9.904.850	79,24
4	Pemulihan Usaha Mikro	92.134.000	87.034.000	94,46
5	Penyediaan Tempat Prototipe dan Pengembangan	200.000.000	198.892.000	99,52
6	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	29.891.100	25.336.000	84,77
7	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM	36.920.200	36.920.200	100,00
<b>G</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
1	Produk dan Pengujian, Perawatan, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	159.434.600	76.821.200	48,18

No	Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>			
<b>A</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>			
1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Kemasan Akhir Bahan Berbahaya (P-A-BB) maupun Produk B3 (P-B3)	20.911.300	20.890.300	82,71
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			
1	Pembangunan dan Perluasan Sarana Distribusi Perdagangan			
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	625.952.000	610.303.750	96,18
2	Fasilitas Pengalihan Sarana Distribusi Perdagangan	99.378.180	95.354.320	95,95
3	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	32.721.598	32.650.588	78,92
<b>C</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>			
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	637.204.200	622.675.000	129,92
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Petaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	67.716.700	67.693.900	99,97
2	Polisiansi Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	17.723.976	15.547.976	62,19
<b>D</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>			
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berapa Tara, Tara Ulang, dan Pengawasan			
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berapa Tara, Tara Ulang	202.873.400	202.000.989	117,33
2	Pengawasan/Periyahan Metrologi Legal	29.951.400	29.792.704	133,62
3	Persyikan Metrologi Legal	3.471.400	3.471.400	51,65
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENGUNJUAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>			
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	916.560.000	916.460.000	225,67
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>			
<b>F</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>			
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
1	Koordinasi, Sekorisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan, Penyebaran dan Pemakayahan Industri	19.715.800	17.204.000	124,44
2	Koordinasi, Sekorisasi, dan Pelaksanaan Penterjemahan Industri dan Pemas Serta Masyarakat	21.917.800	21.688.400	97,44
3	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	55.722.000	53.115.900	107,91
<b>G</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>			
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk RI, IPG, IUK dan IPK Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	Fasilitas Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINa)	704.091.870	683.002.626	79,21

Dalam hal akuntabilitas keuangan, LaKIP ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

### 1.a SUMBER DANA APBD

Pagu Anggaran DISKOPUKMPP dari sumber dana APBD tahun 2025 Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 11.885.799.177. Adapun realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 10.837.567.777 dengan presentase 91,18 %.

Pada tabel 1.1

**PLAFON ANGGARAN DAN REALISASI APBD TA 2025 BAIK BELANJA OERASI MAUPUN BELANJA MODAL SEBAGAI BERIKUT :**

No	Uraian	Plafon (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI	11.546.047.177	10.498.165.777	88,33
2	BELANJA MODAL	339.752.000	339.402.000	99,90
<b>TOTAL</b>		<b>11.885.799.177</b>	<b>10.837.567.777</b>	<b>91,18</b>

### 1.b REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Sebesar Rp1.595.338.420 atau 79,33 % dari jumlah Target sebesar Rp. 2.011.030.720 dengan rincian tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2

#### REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) TA 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	4.1.02.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontraksikan	Rp. 582.480.000	Rp. 450.330.000	77,31
2.	4.1.02.02.02.0002 Kontribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontraksikan	Rp. 1.408.550.720	Rp. 1.122.799.260	79,71
3.	4.1.04.13.02.0002 Pendapatan Demula Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp. 20.000.000	Rp. 22.209.160	111,05
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp2.011.030.720</b>	<b>Rp1.595.338.420</b>	<b>79,33</b>

## P E N U T U P

### A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) yang terusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2025. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

LaKIP ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. : 53 Tahun 2014.

Gambaran Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2025 sebagai realisasi atas rencana kinerja.

### B. SARAN

Dengan tersusunnya LaKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2025 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.

Buntok, Februari 2026

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Barito Selatan,



**HARMITO, S.Pd., MM**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700201 199303 1 019

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan di Pohon Kinerja, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**TABEL SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, SATUAN DAN TARGET**

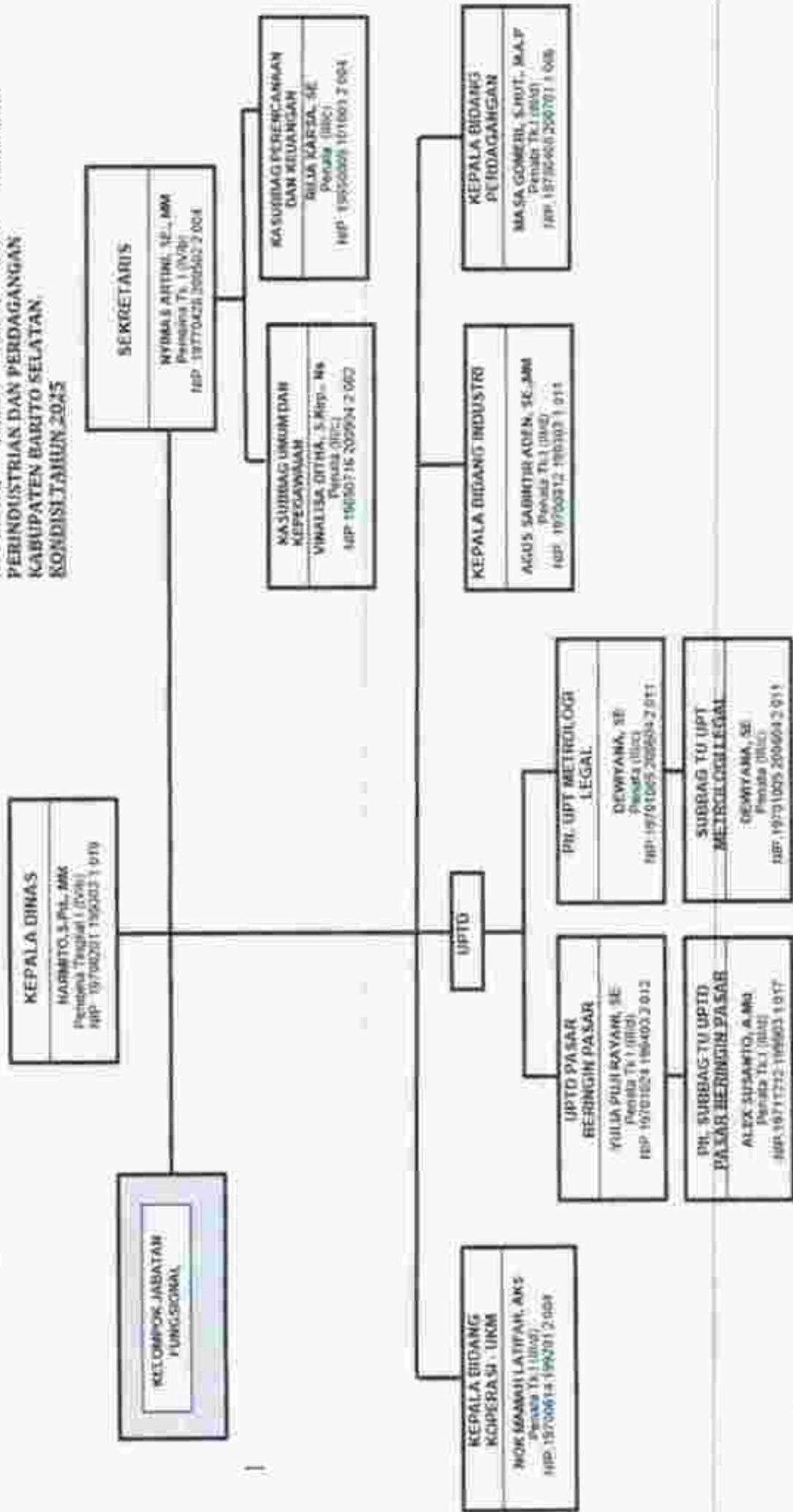
NO.	INDIKATOR KINERJA PD	SATUAN	TARGET	REALISASI SAMPAI TW IV 2025
1.	Nilai BAKIP ORSDANGKOPTUM	KRITERIA	8	
	Persentase Pertumbuhan Pengadaan Anggaran (%)	PERSEN	100	100
	Persentase Laju Usaha Perdagangan yang Dibuktikan (%)	PERSEN	100	100
	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	PERSEN	9,09	18,30
	Persentase Laju Usaha Industri yang Diberikan (%)	PERSEN	9,09	18,30
2.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	PERSEN	15	9,21
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	PERSEN	25	25
	Persentase koperasi aktif (%)	PERSEN	30	37,82
	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	PERSEN	30	100
	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	PERSEN	30	10,32
	Persentase Usaha Kecil yang Bertumbuh dari informal ke formal (%)	PERSEN	30,92	37,97
	Pertumbuhan Wiraswasta (%)	PERSEN	13	25,72
	Proporsi UKM Mengikuti Kemiskinan dan Ekspor (%)	PERSEN	20	14,28
	Persentase Produk Lokal yang Didominasi/ Didukung (Perantara)	PERSEN	30	25,25
3.	Persentase Usaha Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	PERSEN	79,4	80
	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	PERSEN	10,79	100
	Nilai Ekspor Barang (%)	PERSEN	0	100
	Persentase Kualitas Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	PERSEN	17,95	18,60

## LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .
3. Pohon Kinerja Tahun 2025 – 2029
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Gambar .....Struktur Organisasi DISKOPUKMPP Kab.Barsel

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2024  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN  
 MENENGAH  
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN BARITO SELATAN,  
 KONDISI TAMUN 2025



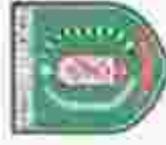


**DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**



**PERJANJIAN KINERJA 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, SWITA MINARSIH, SE. Jabatan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Neoptisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berakap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*Conflict Of Interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada Pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama Pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta turut menjaga kerubasaan sukai atas pelanggaran Peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Buntok, Januari 2025

Mengotahui :

Pj. BUPATI BARITO SELATAN



DR. H. DEDDY WINARWAN, M.Si., CGCAE., CRGP

SWITA MINARSIH, SE  
NIP.19670630 199203 2 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UBAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SWITA MINARSIH, SE**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. H. DEDDY WINARWAN, M.SI., CGCAE., CRGP**  
Jabatan : **Pj. BUPATI BARITO SELATAN**

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA** Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

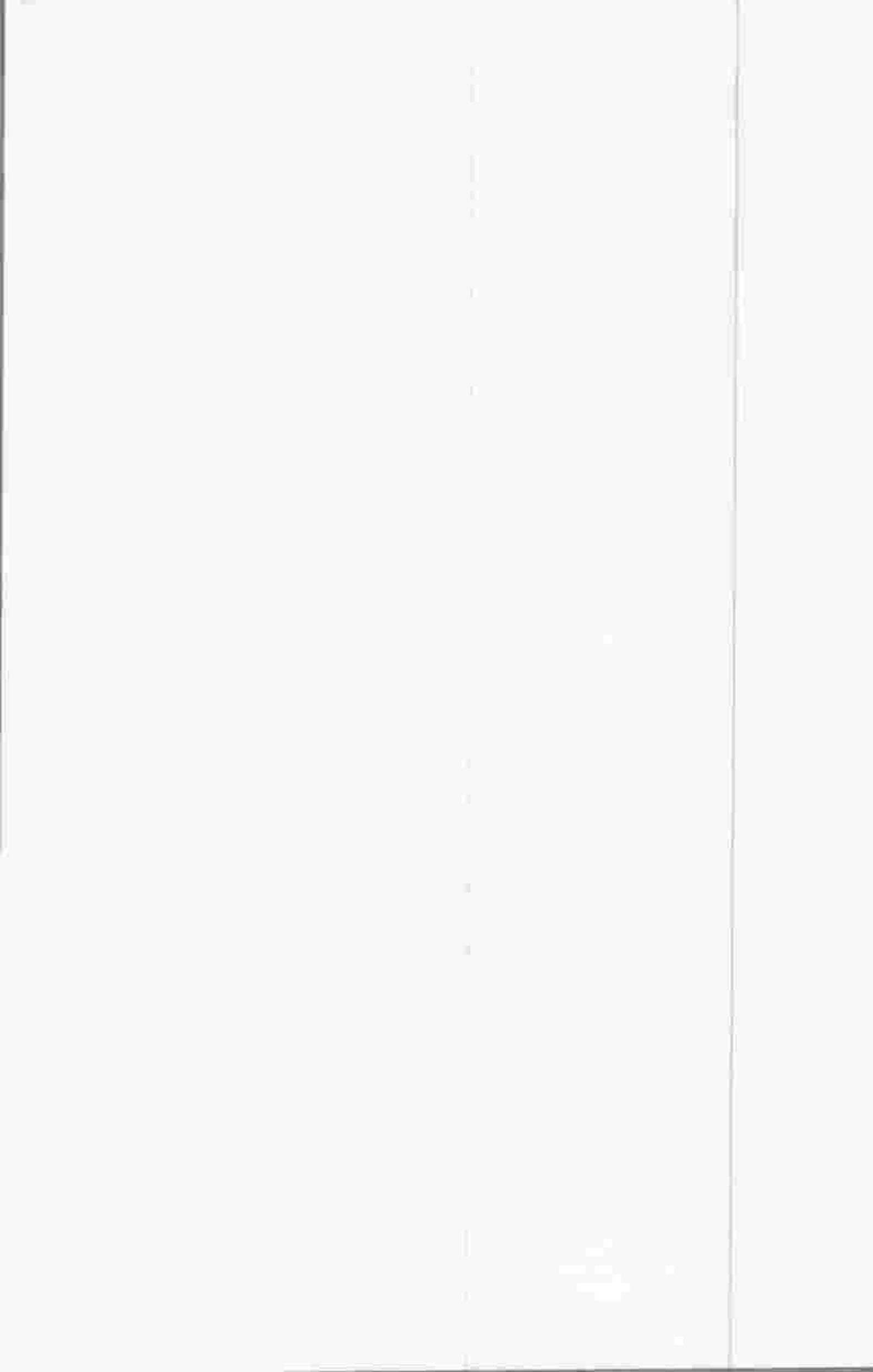
Buntok, Januari 2025

f **PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

f **Dr. H. DEDDY WINARWAN, M.SI., CGCAE., CRGP**

**SWITA MINARSIH, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670630 199203 2 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akontabel	Nilai SAKIP DISDAGKOP UKM	KRITERIA	B
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah	Tingkat Inflasi	Persen	2-4
		PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan	Milyar Rupiah	85,8
		PDRB per Kapita.	Juta	59,25
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Lembaga keuangan yang menjadi koperasi	Persen	40 %
		Persentase koperasi aktif	Persen	40 %
		Persentase koperasi dengan SDM yang tersertifikasi/terlatih	Persen	40 %
4.	Meningkatnya volume usaha/omset koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)	Persen	40 %
5.	Meningkatnya kualitas UMKM	Persentase usaha mikro naik jadi usaha kecil	Persen	50 %
		Persentase usaha kecil naik jadi menengah	Persen	50 %
		Nilai omzet UMKM di barsel	Persen	50 %
6.	Meningkatnya nilai ekspor produk unggulan dengan indikator nilai ekspor barang dan jasa	Nilai Impor barang dan Jasa Kalteng (juta US\$)	Persen	40 %
7.	Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang	nilai koefisien variasi harga barang pokok dan kebutuhan penting per komoditi	Persen	40 %

	penting.			
8.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan	Jumlah sarana perdagangan dengan kondisi baik	Persen	25 %
9.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	100 %
10.	Meningkatnya daya saing IKM	Jumlah IKM atau %IKM naik kelas	Persen	40 %

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.356.970.676	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	37.978.200	
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	10.016.800	
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	31.870.400	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	84.530.000	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	563.055.960	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	159.434.600	
8	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	32.996.100	
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.333.627.778	
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	579.920.876	
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	208.668.200	
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	406.094.000	
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	84.664.800	
14	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	862.289.610	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>10.752.118.000</b>	

Buntok, Januari 2025

PIHAK KEDUA,



Dr. H. DEDDY WINARWAN, M.Si., CGCAE., CRGP

PIHAK PERTAMA,



SWITA MINARSIH, SE  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670630 199203 2 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MASA GOMERI, S.Hut. MAP**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERDAGANGAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SWITA MINARSIH, SE**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA** Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, Januari 2025

**PIHAK KEDUA,**

**SWITA MINARSIH, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19670630 199203 2 011

**PIHAK PERTAMA,**

**MASA GOMERI, S.Hut. MAP**  
Penata TK.I (III/d)  
NIP.19780408 200701 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN,**  
**PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP DISDAGKOP UKM	KRITERIA	B
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah	Tingkat Inflasi	Persen	2-4
		PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan	Milyar Rupiah	85,8
		PDRB per Kapita	Juta	59,25
3.	Meningkatnya nilai ekspor produk unggulan dengan indikator nilai ekspor barang dan jasa	Nilai Impor barang dan Jasa (juta US\$)	Persen	40 %
4.	Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	nilai koefisien variasi harga barang pokok dan kebutuhan penting per komoditi	Persen	40 %
5.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan	jumlah sarana perdagangan dengan kondisi baik	Persen	25 %
6.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	100 %

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
8	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	32.996.100	
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.333.627.778	
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	579.920.876	
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	208.668.200	
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	406.094.000	

**JUMLAH TOTAL**

**2.561.306.954**

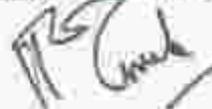
Buntok, Januari 2025

**PIHAK KEDUA,**



**SWITA MINARSIH, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670630 199203 2 011

**PIHAK PERTAMA,**



**MASA GOMERI, S.Hut. MAP**  
Penata TK.I (III/d)  
NIP. 19780408 200701 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOK MAMAH LATIFAH, A.K.S  
Jabatan : KEPALA BIDANG KOPERASI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SWITA MINARSIH, SE  
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA** Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, Januari 2025

**PIHAK KEDUA,**

  
**SWITA MINARSIH, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670630 199203 2 011

**PIHAK PERTAMA,**

  
**NOK MAMAH LATIFAH, A.K.S**  
Penata TK.I (III/d)  
NIP. 19700614 199201 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN,**  
**PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP DISDAGROP UKM	KRITERIA	B
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah	Tingkat Inflasi	Persen	2-4
		PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan	Milyar Rupiah	85,8
		PDRB per Kapita.	Juta	59,25
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Lembaga keuangan yang menjadi koperasi	Persen	40 %
		Persentase koperasi aktif	Persen	40 %
		Persentase koperasi dengan SDM yang tersertifikasi/terlatih	Persen	40 %
4.	Meningkatnya volume usaha/omzet koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omzet(%)	Persen	40 %
5.	Meningkatnya kualitas UMKM	Persentase usaha mikro naik jadi usaha kecil	Persen	50 %
		Persentase usaha kecil naik jadi menengah	Persen	50 %
		Nilai omzet UMKM di barsel	Persen	50 %
6.	Meningkatnya nilai ekspor produk unggulan dengan indikator nilai ekspor barang dan jasa	Nilai Impor barang dan Jasa kalteng (juta US\$)	Persen	40 %
7.	Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting.	nilai koefisien variasi harga barang pokok dan kebutuhan penting per komoditi	Persen	40 %

8.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan	jumlah sarana perdagangan dengan kondisi baik	Persen	25 %
9.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	100 %
10.	Meningkatnya daya saing IKM	Jumlah IKM atau %IKM naik kelas	Persen	40 %

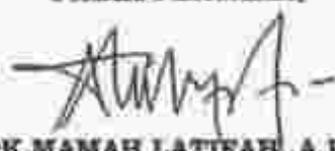
No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
8	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	32.996.100	
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.333.627.778	
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	579.920.876	
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	208.668.200	
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	406.094.000	
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	84.664.800	
14	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	862.289.610	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>3.508.261.364</b>	

Buntok, Januari 2025

**PIHAK KEDUA,**

**SWITA MINARSIH, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19670630 199203 2 011

**PIHAK PERTAMA,**

  
**NOK MAMAH LATIFAH, A.K.S**  
Penata TK.1 (III/d)  
NIP. 19700614 199201 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS SABINTIR ADEN, SE.,MM**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG INDUSTRI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SWITA MIHARSIH, SE**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA** Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, Januari 2025

**PIHAK KEDUA,**

**SWITA MIHARSIH, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19670630 199203 2 011

**PIHAK PERTAMA,**

**AGUS SABINTIR ADEN, SE.,MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP.19700812 199303 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN,**  
**PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP DISDAGKOP UKM	KRITERIA	B
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah	Tingkat inflasi	Persen	2-4
		PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan	Milyar Rupiah	85,8
		PDRB per Kapita.	Juta	59,25
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Lembaga keuangan yang menjadi koperasi	Persen	40 %
		Persentase koperasi aktif	Persen	40 %
		Persentase koperasi dengan SDM yang tersertifikasi/terlatih	Persen	40 %
4.	Meningkatnya volume usaha/omzet koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omzet(%)	Persen	40 %
5.	Meningkatnya kualitas UMKM	Persentase usaha mikro naik jadi usaha kecil	Persen	50 %
		Persentase usaha kecil naik jadi menengah	Persen	50 %
		Nilai omzet UMKM di barsel	Persen	50 %
6.	Meningkatnya nilai ekspor produk unggulan dengan indikator nilai ekspor barang dan jasa	Nilai impor barang dan Jasa Kalteng (juta US\$)	Persen	40 %
7.	Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting.	nilai koefisien variasi harga barang pokok dan kebutuhan penting per komoditi	Persen	40 %

8.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan	jumlah sarana perdagangan dengan kondisi baik	Persen	25 %
9.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	100 %
10.	Meningkatnya daya saing IKM	Jumlah IKM atau %IKM naik kelas	Persen	40 %

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	84.664.800	
14	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	862.289.610	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>946.954.410</b>	

Buntok, Januari 2025

**PIRAK KEDUA,**



**SWITA MINARSIH, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19670630 199203 2 011

**PIRAK PERTAMA,**



**AGUS SABINTUR ADEN, SE.,MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700813 199303 1 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN HARITO SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NYIMAS ARTINI, SE., MM**  
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HARITO  
SELATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SWITA MINARSIH, SE**  
Jabatan : **KEPALA DINAS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HARITO  
SELATAN**

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA** Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, Januari 2025

**PIHAK KEDUA,**

  
**SWITA MINARSIH, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19670630 199203 2 011

**PIHAK PERTAMA,**

  
**NYIMAS ARTINI, SE., MM**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19770428 200502 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN**  
**PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP DISDAGKOP UKM	KRITERIA	B
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah	Tingkat Inflasi	Persen	2-4
		PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan	Milyar Rupiah	85,8
		PDRB per Kapita,	Juta	59,25
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Lembaga keuangan yang menjadi koperasi	Persen	40 %
		Persentase koperasi aktif	Persen	40 %
		Persentase koperasi dengan SDM yang teracertifikasi/terlatih	Persen	40 %
4.	Meningkatnya volume usaha/omset koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)	Persen	40 %
5.	Meningkatnya kualitas UMKM	Persentase usaha mikro naik jadi usaha kecil	Persen	50 %
		Persentase usaha kecil naik jadi menengah	Persen	50 %
		Nilai omzet UMKM di barsel	Persen	50 %
6.	Meningkatnya nilai ekspor produk unggulan dengan indikator nilai ekspor barang dan jasa	Nilai Impor barang dan Jasa Kalteng (juta US\$)	Persen	40 %

7.	Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting.	nilai koefisien variasi harga barang pokok dan kebutuhan penting per komoditi	Persen	40 %
8.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan	jumlah sarana perdagangan dengan kondisi baik	Persen	25 %
9.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	100 %
10.	Meningkatnya daya saing IKM	Jumlah IKM atau %IKM naik kelas	Persen	40 %

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.356.970.676	

**JUMLAH TOTAL**

**6.356.970.676**

Buntok, Januari 2025

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

  
**SWITA MINARGIH, SE**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19670630 199203 2 011

  
**NYIMAS ARTINI, SE., MM**  
 Pembina TK.I (IV/b)  
 NIP.19770428 200502 2 004

**POHON KINERJA TAHUN 2025 – 2029**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**

**SASARAN RPJMD :**

1. Meningkatkan kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah
2. Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing

**TUJUAN RPJMD :**

1. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah.
2. Meningkatkan pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan
3. Meningkatkan Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik

**INDIKATOR RPJMD**

1. Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%)
2. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)
3. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)
4. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah

Indikator Daerah : Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%), Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase), Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase), Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing

Indikator Daerah : Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%), Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase), Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase), Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

Indikator Daerah : Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%), Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase), Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase), Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)



**Meningkatnya kualitas layanan izin usaha sipan pinjam**

IK : Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)

**Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi**

IK : Persentase Pengawasan dan Pemertasaan Koperasi (Persentase)

**Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi**

IK : Persentase Koperasi Aktif

**Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian**

IK : Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)

**Meningkatnya produktivitas koperasi**

IK Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

**Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri**

IK : Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal , Pertumbuhan Virusaha (%)

**Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi**

IK : Persentase Sarana Perdagangan yang Dilengkapi Kualitasnya

**Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**

IK : Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

**Meningkatnya palaku usaha yang berorientasi ekspor**

IK : Nilai Ekspor Barang (Nilai)

**Meningkatnya realisasi pembangunan industry**

IK : Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri

**Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**

IK : Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

**Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendataran berusaha**

IK : Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi

**Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk**

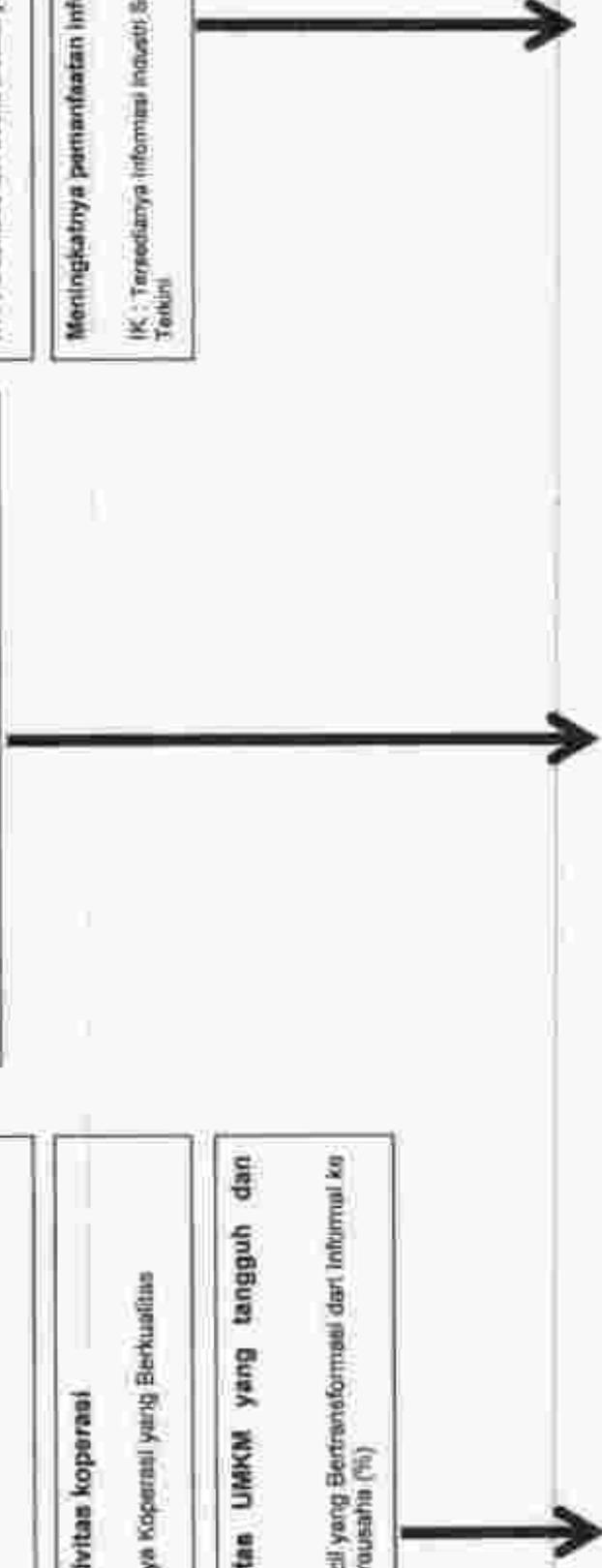
IK : Persentase penanganan pengaduan konsumen

**Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian**

IK : Persentase Izin Usaha Industri yang Diberikan

**Meningkatnya pemanfaatan informasi industry**

IK : Tersedianya informasi industry secara lengkap, akurat, dan Terkini



**Meningkatnya daya saing UMKM**

IK : Proposal UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor

**Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam**

IK : Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam

**Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri**

IK : Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan



SUB Kegiatan untuk mendukung Sasaran dan IK

1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
5. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoprasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
7. Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota
8. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
9. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
10. Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
11. Fasilitas Pelebaran Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

SUB Kegiatan untuk mendukung Sasaran dan IK

1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
4. Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
6. Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
7. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
8. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
9. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
10. Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
11. Peningkatan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
12. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
13. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

SUB Kegiatan untuk mendukung Sasaran dan IK

1. Penyediaan Uji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Perujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Pengadaan Pakelan Dinas besertaAtribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
7. Fasilitas Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor
12. Penyediaan Jasa Perjalanan Umum Kantor
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

12. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemiripan, Kamudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
13. Pemberdayaan Melalui Kemiripan Usaha Mikro
14. Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
15. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
16. Pemulihan Usaha Mikro
17. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
18. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
19. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
20. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi
21. Pelaksanaan Promosi Pengurusan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

14. Pemasaran dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
15. Pameran Dagang Nasional
16. Pameran Dagang Lokal
17. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
18. Peningkatan Citra Produk Ekspor
19. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
20. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
21. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
22. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
23. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemantauan Samping Produk Dalam Negeri
24. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
25. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwujudan Industri
26. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemerintahan Industri dan Peran Serta Masyarakat
27. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

16. Fasilitas Perizinan Tanda Daftar Gudang
17. Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
18. Fasilitas Perizinan dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Secara Elektronik
19. Fasilitas Perizinan dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
20. Fasilitas Perizinan dan/atau Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
21. Pemeriksaan Penyelidikan Bahan Berbahaya
22. Fasilitas Perizinan dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
23. Pengembangan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-BB) maupun Produksi BB (P-BB)
24. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Perizinan SIK
25. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Terak, Yera Ulang
26. Penguatan Penyelidikan Metrologi Legal
27. Penguatan Pemahaman Masyarakat dan Pengembangan Metrologi Legal
28. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perizinan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perizinan Kawasan Industri (IPKI) Kawasan Kabupaten/Kota
29. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kawasan Kabupaten/Kota
30. Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

dan Pergerakan  
Kantor Selatan,



HARMITO, S.Pd., MM  
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700201 199303 1 019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
(MENYESUAIKAN RENSTRA 2025 - 2029)  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA PD	SATUAN	TARGET	REALISASI SAMPAI TW IV 2025
1.	Nilai SAKIP DISDAGKOP UKM	KRITERIA	B	
	Persentase Pemungutan Pengaduan Konsumen (%)	PERSEN	100	100
	Persentase lain Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	PERSEN	100	100
	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	PERSEN	9,09	18,30
	Persentase lain Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	PERSEN	9,09	18,30
2.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	PERSEN	15	9,34
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	PERSEN	25	25
	Persentase koperasi aktif (%)	PERSEN	20	57,82
	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	PERSEN	20	100
	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	PERSEN	20	10,52
	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari informal ke Formal (%)	PERSEN	30,92	37,97
	Pertumbuhan Wirusaha (%)	PERSEN	15	25,73
	Proporsi UKM Menjalani Kemitraan dan Ekspor (%)	PERSEN	20	14,28
	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	PERSEN	20	25,25
	3.	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	PERSEN	79,4
Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)		PERSEN	19,79	100
Nilai Ekspor Barang (%)		PERSEN	0	100
Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)		PERSEN	17,95	18,60

